



Jogja Kota Percontohan BPNT

UMBULHARJO, BERNAS

– Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) kembali memilih Jogja sebagai kota percontohan penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT). Ini merupakan tindak lanjut dari launching program E-Warung PKH di Bintaran pada pertengahan 2016.

Demikian terungkap dalam sosialisasi pencairan dana program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017, Jumat (17/2) malam, di Ruang Bima Balaikota Yogyakarta.

Hadir dalam kesempatan itu Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI Andi Za Dulung serta Penjabat (PJ) Walikota Yogyakarta, Sulistyio. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

"Perubahan mekanisme bantuan dari tunai menjadi nontunai ini untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif, sekaligus menghilangkan penyalahgunaan bantuan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dana bansos PKH," ungkap Andi Za Dulung.

Menurut dia, subsidi disalurkan secara nontunai dan



SOSIALISASI - Penjabat Walikota Yogyakarta, Sulistyio, menyampaikan sambutan dalam acara sosialisasi pencairan dana program KPM dan PKH tahun 2017, Jumat (17/2) malam, di Balaikota Yogyakarta.

menggunakan sistem perbankan supaya memudahkan kontrol, pemantauan dan memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

"Agar penyaluran bansos nontunai ini berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh penerima manfaat, sosialisasi harus terus dilakukan sehingga akses masyarakat kepada jasa layanan keuangan menjadi terbuka, kegiatan ekonomi meningkat dan masyarakat sejahtera," kata dia.

Selanjutnya, Dirjen memerintahkan camat, lurah, serta para pendamping PKH melaku-

kan sosialisasi. Mereka harus aktif mendatangi dan memberi sosialisasi kepada para penerima bantuan. "Jangan sampai salah karena satu pendamping harus memberikan sosialisasi kepada penerima PKH," katanya.

Setiap satu bulan sekali pemerintah akan menyalurkan dana sebesar Rp 110.000. Nominal tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula dan minyak.

Selain itu, warga penerima bantuan pun bisa mengambil uang dengan menggunakan kartu tersebut. Bahkan warga

bisa menabung di bank yang sudah ditunjuk pemerintah untuk memberikan layanan kartu tersebut.

"Layanan elektronik voucher ini digunakan untuk menyalurkan bantuan PKH dan penerima beras rakyat sejahtera (Rastra). Program ini juga merupakan layanan untuk transaksi jual beli bahan pokok tanpa menggunakan uang tunai," terangnya.

Penjabat Walikota Yogyakarta, Sulistyio, mengatakan bantuan tersebut tentunya sangat membantu masyarakat kurang mampu.

"Ini bukan lagi program bi-

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005